

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN RUANG FISKAL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI BALI**

*I Wayan Dodi Iswara*¹

*I Nyoman Mahaendra Yasa*²

^{1,2}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan suatu langkah yang diyakini dapat mendorong adanya pembangunan daerah. Salah satu bentuk penerapan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam mendukung hal tersebut, daerah bertopang pada sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari dalam daerah berupa PAD maupun luar daerah berupa dana perimbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan dan ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal dan penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Titik pengamatan dalam penelitian ini berjumlah 63 titik pengamatan yaitu pada tahun 2012-2018. Dengan menggunakan teknik analisis jalur didapat hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dana perimbangan dan ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan, namun alokasi belanja modal berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dana perimbangan dan ruang fiskal tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui alokasi belanja modal.

Kata kunci: *dana perimbangan, ruang fiskal, alokasi belanja modal, penyerapan tenaga kerja*

Klasifikasi JEL: E42, O23, H53, J21

ABSTRACT

Regional autonomy is a step that is believed to be able to encourage regional development. One form of the implementation of regional autonomy is the existence of fiscal decentralization which aims to increase regional economic growth. In supporting this, the region relies on regional income sources, both from within the region in the form of PAD and outside the region in the form of balance funds. The purpose of this study was to analyze the effect of balance funds and fiscal space on the allocation of capital expenditure and labor absorption in regencies / cities in Bali Province. The observation points in this study were 63 observation points, namely in 2012-2018. Using the path analysis technique, the results show that the balance fund has a negative and significant effect, while fiscal space has a positive and significant effect on the allocation of capital expenditure. Balance funds and fiscal space have a positive and significant effect, but the allocation of capital expenditure does not have a significant negative effect on employment. Balance funds and fiscal space do not have an indirect effect on the absorption of district / city labor in Bali Province through the allocation of capital expenditure.

keyword: *balance funds, fiscal space, capital expenditure allocation, employment*

JEL Classification: E42, O23, H53, J21

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi atau hubungan antara berbagai kelompok variabel diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, pelaku pembangunan, input pembangunan, dan konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan pendidikan, perkembangan keterampilan tenaga kerja, perbaikan teknologi, dan kenaikan dalam taraf kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hal yang sangat esensial dalam usaha meningkatkan perekonomian bangsa adalah bidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan situasi dan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Usaha yang dimaksud dalam bidang ini adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja (Dayuh, 2010). Kesempatan kerja, kuantitas, serta kualitas tenaga kerja menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan, yaitu tenaga kerja sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi serta distribusi barang dan jasa dan tenaga kerja sebagai sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar. Kedua fungsi tersebut memungkinkan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dalam jangka panjang, atau dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bloom *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai faktor yang positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaga kerja sendiri baik tenaga kerja fisik maupun tenaga kerja pikiran. Besarnya permintaan perusahaan akan tenaga kerja pada dasarnya dilihat dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut.

Pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota Provinsi Bali yang termasuk kedalam penduduk usia kerja semakin lama semakin bertambah yang dimana hal ini menandakan bahwa jumlah angkatan kerja juga semakin bertambah. Pertumbuhan angkatan kerja yang semakin lama semakin bertambah tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif. Bertambahnya jumlah angkatan kerja mengartikan bahwa di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali memiliki jumlah sumberdaya manusia yang memadai sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Namun, disisi lain hal itu akan berdampak negatif jika tidak diiringi dengan adanya kualitas yang memadai dari setiap angkatan kerja dan juga hal yang paling penting yaitu mengenai ketersediaan lapangan perkerjaan.

Banyaknya jumlah angkatan kerja yang tersedia tetapi jika tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maka hal tersebut akan berdampak pada suatu kondisi yang disebut dengan pengangguran (Ningsih & Indrajaya, 2015). Setiap daerah di Indonesia, tidak terkecuali kabupaten/kota di Provinsi Bali tentunya ingin memanfaatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia untuk dapat berkontribusi dengan baik pada kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Besarnya penyerapan tenaga kerja di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 1.

Perkembangan penyerapan tenaga kerja menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, penyerapan tenaga kerja

tertinggi terjadi di Kota Denpasar yaitu sebesar 516.642 orang, Kabupaten Buleleng sebesar 371.368 orang, dan Kabupaten Badung sebesar 357.451 orang. Sedangkan, di kabupaten lainnya di Provinsi Bali hanya mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang relatif rendah. Jika difokuskan pada Kabupaten Jembrana, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Jembrana justru mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat lebih dalam, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Buleleng paling besar terjadi pada sektor pertanian yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja total di Kabupaten Buleleng menjadi tinggi setelah Kota Denpasar. Perbedaan pada penyerapan tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat terjadi karena adanya perbedaan kemampuan dari masing-masing daerah dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki untuk dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Tabel 1. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012-2018

| Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jembrana | 152.066 | 135.611 | 142.086 | 142.434 | 142.434 | 162.665 | 161.024 |
| Tabanan | 261.379 | 262.044 | 262.006 | 264.113 | 264.113 | 246.754 | 271.836 |
| Badung | 319.930 | 325.012 | 322.913 | 338.816 | 338.816 | 343.229 | 357.451 |
| Gianyar | 266.747 | 262.409 | 265.787 | 283.779 | 283.779 | 300.370 | 306.437 |
| Klungkung | 96.527 | 99.416 | 100.803 | 104.130 | 104.130 | 103.972 | 106.035 |
| Bangli | 141.782 | 140.122 | 143.857 | 135.709 | 135.709 | 142.559 | 146.608 |
| Karangasem | 238.928 | 242.195 | 240.451 | 241.983 | 241.983 | 238.742 | 253.469 |
| Buleleng | 348.514 | 345.423 | 333.594 | 345.326 | 345.326 | 358.107 | 371.368 |
| Denpasar | 426.602 | 429.844 | 461.135 | 468.515 | 468.515 | 501.909 | 516.642 |
| Provinsi Bali | 2.252.475 | 2.242.076 | 2.272.632 | 2.324.805 | 2.416.555 | 2.398.307 | 2.490.870 |

Sumber: *www.bali.bps.go.id, 2019*

Provinsi Bali yang terkenal dengan sektor pariwisata tentunya menjadikan sektor tersebut sebagai daya jual ekonomi. Satu dekade terakhir, sektor pariwisata menjadi sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh Provinsi Bali (Bendesa dan Sukarsa, 2012). Semakin meningkatnya perkembangan pariwisata di Provinsi Bali mengharuskan

pemerintah mendorong pembangunan di bidang pariwisata sehingga menyebabkan semakin terbukanya kesempatan kerja yang terjadi di sektor pariwisata. Sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, sehingga Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi di Provinsi Bali, hal tersebut tentu menjadikan penyerapan tenaga kerja hanya terpusat di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Kemampuan penyerapan tenaga kerja yang berbeda beda di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali juga terjadi karena belum berfungsinya sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan di segala bidang, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan dinamis. Adanya ketimpangan tersebut menyebabkan meningkatnya penawaran tenaga kerja tanpa diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang mampu menampung angkatan kerja baru untuk masuk ke dalam pasar kerja.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam hal ini *supply* lebih besar daripada *demand* tentunya menimbulkan masalah pengangguran. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah melalui pembangunan dalam hal infrastuktur dan juga barang-barang modal yang dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan.

Menurut Wiwekananda & Suyana Utama (2016), pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infratraktur dapat tersedia lebih banyak, hal tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan pengalokasian dana untuk belanja modal pada setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi akan memberikan kontribusi yang positif apabila

pemerintah pusat memberikan kewenangan yang tinggi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pengeluaran pemerintah melalui kebijakan desentralisasi fiskal (Desmond *et al.*, 2015).

Kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam kebijakan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk semakin nyata memanfaatkan kewenangannya dalam mengembangkan kapasitas pembangunan dan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan APBD merupakan gambaran keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek belanja daerah, kebijakan belanja daerah harus bisa memberikan efek multiplier yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat melalui program-program yang didanainya. Desentralisasi fiskal pada alokasi belanja daerah merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai jembatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perkembangan alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali rata-rata mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2018. Pengalokasian belanja modal terbesar pada tahun 2012-2018 terjadi di Kabupaten Badung, sedangkan rata-rata pengalokasian modal terendah terjadi di Kabupaten Klungkung. Perbedaan pengalokasian belanja modal pada masing-masing daerah dikarenakan perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah yang menyebabkan perbedaan pengalokasian pada pengeluaran daerah salah satunya untuk belanja modal.

Nurudeen (2010) menyatakan bahwa, pemerintah memiliki peran yang besar dalam pembangunan, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan pengeluarannya dalam bentuk belanja daerah yang lebih efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat daerah bersangkutan, khususnya pada sektor-sektor pembangunan daerah yang memiliki nilai strategis dalam menciptakan *multiplier* yang

tinggi. Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangatlah besar melalui pembiayaan yang dilakukan pemerintah (Dalamagas *et al.*, 2010). Untuk itu efisiensi dan efektivitas peran pemerintah menurut Irvan & Karmini (2016) dapat dicapai karena pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya, mereka akan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat daripada pemerintah pusat.

Daerah memiliki kelebihan dalam hal membuat anggaran pembelanjaan sehingga bisa lebih efisien dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena daerah lebih mengetahui keadaan daerahnya (Kusuma, 2016). Dengan asumsi tersebut, Husna & Yudhistira (2017) menyarankan bahwa penyediaan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Silver *et al.*, 2015). Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangan daerah secara optimal.

Berbagai usaha untuk mewujudkan hal tersebut dapat dituangkan dalam pengalokasian belanja modal pada setiap daerah yang dijabarkan dalam APBD sebagai investasi sektor publik yang sangat diperlukan (Taufik, 2015). Hal ini sesuai dengan pernyataan Butkiewicz & Yanikkaya (2011) bahwa belanja publik untuk modal dan pendidikan adalah investasi yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah selalu didorong untuk senantiasa meningkatkan alokasi belanja modalnya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui alokasi belanja modal tersebut akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat melalui program kegiatan pembangunan yang diimplementasikan setiap tahunnya seperti pembangunan infrastruktur di perdesaan dan perkotaan yang bersifat padat karya. Ketersediaan sejumlah infrastruktur di daerah akan mendorong minat para investor untuk melakukan investasi (Lindblad, 2015), yang nantinya akan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa pada berbagai aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat

yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan (Nworji *et al.*, 2012).

Alokasi belanja modal disetiap daerah tentunya harus ditingkatkan untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi penyerapan tenaga kerja. Sumber pengalokasian belanja modal daerah dapat bersumber dari besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dan juga besarnya ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah. Besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang akan dialokasikan ke dalam beberapa bagian termasuk didalamnya pengalokasian untuk belanja modal daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah bertujuan mengatasi ketimpangan fiskal, sehingga daerah mampu mengalokasinya untuk membangun fasilitas-fasilitas publik (Ogujiuba & Abraham, 2012).

Mahi & Nazara (2015) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer ke daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besarnya pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Anggaraini dan Suyana (2018) menyatakan bahwa semakin bertambahnya dana perimbangan maka dana yang akan dialokasikan untuk belanja daerah juga akan bertambah yang pada ujungnya akan meningkatkan produktivitas penduduk.

Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2012-2018 mendapatkan dana perimbangan terendah. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten Badung telah mampu membiayai pemerintahannya, sehingga ketergantungan akan pemerintah pusat relatif rendah. Sedangkan Kabupaten Buleleng dan Tabanan mendapatkan dana perimbangan tertinggi

yang menandakan peran pemerintah pusat dalam membiayai jalannya pemerintahan di Kabupaten Buleleng dan Tabanan masih sangat diperlukan.

Salah satu wujud berhasil tidaknya suatu perekonomian juga dapat dilihat melalui ketersediaan ruang bagi daerah untuk dapat memajukan daerahnya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan yang biasa disebut dengan ruang fiskal. Pemerintah mendefinisikan ruang fiskal (*fiscal space*) sebagai ketersediaan sumberdaya keuangan bagi pemerintah untuk membiayai kebijakan yang diinginkan melalui anggaran (Cheng & Pitterle, 2018). Kabupaten Badung memiliki ruang fiskal yang paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Badung memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi untuk mengatur arah kebijakan program dan menginovasi kegiatan-kegiatannya secara mandiri. Namun, berdasarkan data pada Tabel 1., Kabupaten Badung berada di urutan ketiga setelah Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng dalam penyerapan tenaga kerja yang dimana seharusnya pemerintah Kabupaten Badung dapat memanfaatkan ketersediaan ruang fiskal yang besar tersebut untuk mengatasi masalah ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Badung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahab & Abdulkadir (2011) menunjukkan bahwa ruang fiskal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, faktor tenaga kerja haruslah diperhatikan yaitu dalam penyediaan lapangan kerja yang memadai. Sehingga sesuai dengan uraian diatas, maka pengalokasian belanja modal pemerintah daerah yang juga dipengaruhi oleh besarnya transfer pusat ke daerah berupa dana perimbangan serta ketersediaan ruang fiskal masing-masing daerah haruslah diperhatikan untuk dapat menunjang ketersediaan lapangan pekerjaan di masing-masing daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah yang menimbulkan penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Bagaimanakah pengaruh dana perimbangan dan ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali? 2) Bagaimanakah pengaruh dana perimbangan, ruang fiskal, dan alokasi belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali? 3) Apakah dana perimbangan dan ruang fiskal berpengaruh secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan dan ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali, menganalisis pengaruh dana perimbangan, ruang fiskal, dan alokasi belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan menganalisis pengaruh dana perimbangan dan ruang fiskal secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menganalisis pengaruh dana perimbangan dan ruang fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja melalui alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja dalam satuan orang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dana perimbangan yang diterima di masing-masing daerah dan ruang fiskal yang dimiliki masing-masing daerah. Variabel intervening yang digunakan adalah alokasi belanja modal masing-masing daerah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang di alokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan dan melaksanakan desentralisasi. Sesuai dengan tujuan dari adanya belanja modal, maka apabila dana perimbangan yang didapat dalam jumlah yang kecil akan membuat biaya yang dikeluarkan untuk belanja modal akan berkurang. Belanja modal yang sedikit akan berdampak pada pemenuhan infrastruktur yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjang dari penyediaan infrastruktur tersebut akan

semakin menurun. Peningkatan pada produktivitas penduduk akan berdampak terhadap kesempatan kerja dan juga kesempatan untuk melakukan usaha sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Besar kecilnya alokasi dana untuk belanja modal daerah juga dipengaruhi oleh besar kecilnya ketersediaan ruang bagi pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana daerah tanpa mengganggu kesinambungan fiskal daerah yang disebut dengan ruang fiskal. Ruang fiskal merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai pendapatan yang masih dapat digunakan untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat ruang fiskal suatu daerah, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat alokasi belanja modal. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah.

Ruang fiskal pemerintah pusat merupakan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dinilai sebagai lokomotif pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan infrastruktur dapat memacu sektor-sektor produktif dan meningkatkan daya saing ekonomi yang akan membuka lebar kesempatan kerja bagi penduduk suatu daerah yang pada akhirnya juga akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pembangunan daerah adalah proses berjalan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan juga sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan semua potensi ekonomi yang paling penting seperti pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakatnya dan investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut. Dengan semakin meningkatnya produktivitas masyarakat dan masuknya investor baik swasta maupun asing akan semakin meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masing-masing daerah.

Efek dari tersedianya infrasktruktur sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan peran pemerintah dalam perekonomian untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD melalui alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal yang dianggarkan pemerintah yang dimana belanja modal bertujuan untuk menggenjot pembangunan mempunyai korelasi atau hubungan yang saling keterkaitan dengan kesempatan kerja.

Alokasi belanja modal akan mendorong investasi, sehingga kapasitas produksi akan meningkat. Kegiatan investasi tersebut memungkinkan kesempatan kerja akan meningkat secara terus-menerus. Namun, sedikitnya investasi yang terealisasi akan menunjukkan lambatnya laju pertumbuhan kesempatan kerja. Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan meningkatkan produksi barang dan jasa pada berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang kemudian akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, peningkatan kapasitas produksi akan mendorong terbukanya sejumlah kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh peningkatan produksi barang dan jasa dari sektor-sektor yang dijalankan oleh masyarakat akan memberikan pengaruh pada penyerapan tenaga kerja.

Kemudian disusun hipotesis yaitu 1) dana perimbangan dan ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2) dana perimbangan, ruang fiskal dan alokasi belanja modal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan 3) dana perimbangan dan ruang fiskal berpengaruh secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

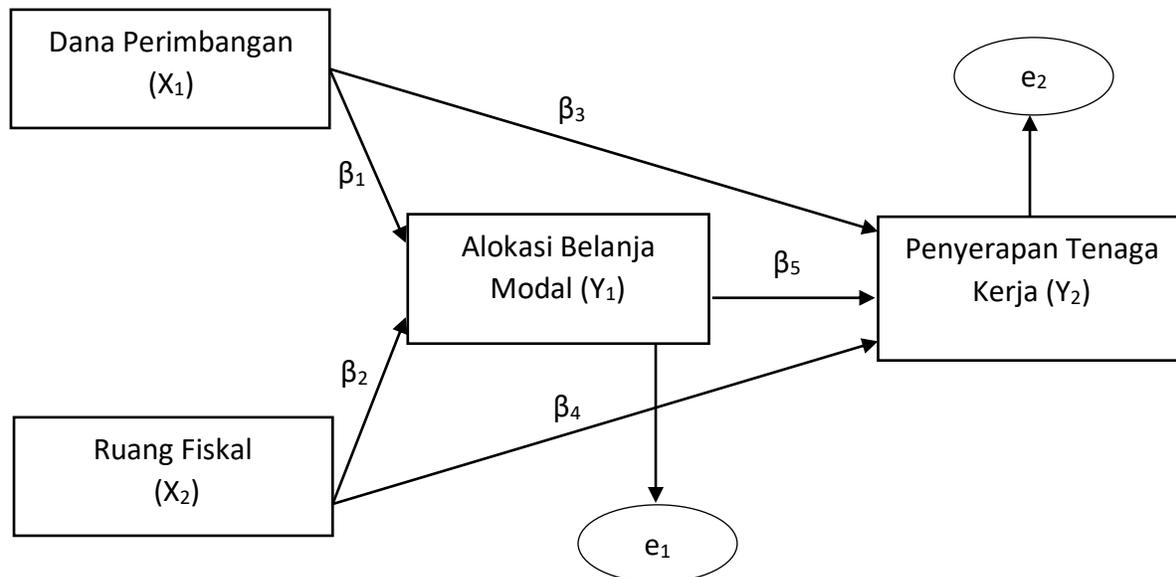
Penelitian ini berbentuk kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan bentuk hubungan kausal dari tahun 2012-2018. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPS) dan dinas yang terkait dengan obyek penelitian. Penyerapan tenaga kerja (Y_2) merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2018 yang diukur dalam satuan orang. Alokasi belanja modal (Y_1), merupakan suatu pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang ada di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2018, hal tersebut berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya yang diukur dalam satuan juta rupiah.

Dana perimbangan (X_1) merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2012-2018 yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diukur dalam satuan juta rupiah. Ruang Fiskal (X_2) mencerminkan ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2012-2018 tanpa mengganggu solvabilitas fiskal dalam membiayai belanja wajib yang diukur dalam satuan juta rupiah.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dana perimbangan, data ruang fiskal, data alokasi belanja modal, serta data penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Titik pengamatan dalam penelitian ini ada di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2012-2018 (7 tahun) maka besarnya ukuran sampel adalah $9 \times 7 = 63$ titik pengamatan dengan

mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan cara observasi non partisipan.

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis jalur/*path analysis*. Analisis jalur adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis antar variabel baik secara langsung maupun tidak langsung antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis jalur dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari pengaruh secara langsung dan tidak langsung antar variabel exogenous dan endogenous (Panji, 2016).



Gambar 1 Desain Penelitian Pengaruh Dana perimbangan dan Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Keterangan:

- X_1 = dana Perimbangan
- X_2 = ruang Fiskal
- Y_1 = alokasi belanja modal
- Y_2 = penyerapan tenaga kerja

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = hubungan antar variabel

Berdasarkan Gambar 1 dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut.

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Langsung Antar Variabel

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 81,7 persen yang berarti sebesar 81,7 persen variabel dana perimbangan, variabel ruang fiskal, variabel alokasi belanja modal, dan variabel penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 18,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Dana Perimbangan dan Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 250,612 | 73,726 | | 3,399 | ,001 |
| 1 Dana Perimbangan | -,239 | ,091 | -,188 | -2,630 | ,011 |
| Ruang Fiskal | ,282 | ,026 | ,792 | 11,045 | ,000 |

Sumber: Data Diolah, 2019

1) Pengaruh Langsung Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut mengartikan bahwa kenaikan pada jumlah dana perimbangan belum dapat meningkatkan alokasi belanja modal pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa dana

perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal memiliki makna bahwa dana perimbangan bukanlah sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai belanja modal masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagian besar dana perimbangan yang dimiliki masing-masing daerah lebih ditujukan kepada belanja yang bersifat operasional seperti belanja pegawai. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Kong dan Arif (2008) yang menyatakan bahwa pengeluaran dalam bentuk belanja modal masih terus menjadi masalah karena dana alokasi yang tidak sepenuhnya digunakan.

Hal tersebut dapat dilihat pada realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada belanja pegawai dan juga belanja barang dan jasa, sedangkan peningkatan pengalokasian belanja modal pemerintah cenderung rendah bahkan dalam dua tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan walaupun adanya peningkatan pada dana perimbangan hal tersebut tidak semata-mata dapat meningkatkan pengalokasian pada belanja modal.

2) Pengaruh Langsung Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut mengartikan bahwa kenaikan pada jumlah ruang fiskal yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat meningkatkan pengalokasian anggaran pada belanja modal masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal mengindikasikan bahwa salah satu faktor penentu meningkatnya alokasi belanja modal masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali sangatlah ditentukan oleh besarnya ruang fiskal yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Besar kecilnya ruang fiskal menentukan besar kecilnya pengalokasian pada belanja modal. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martini & Dwirandra (2015) yang menyatakan bahwa besaran ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Dalam mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah harus mempertimbangkan ruang fiskal yang tercipta pada tahun sebelumnya, karena dalam menyusun anggaran pada APBD pemerintah daerah belum dapat mengetahui secara tepat pendapatan dan belanja yang akan terjadi, maka besaran yang digunakan adalah nilai estimasi. Maka dari itu, pemerintah daerah harus benar-benar memperhitungkan rancangan anggaran pada masing-masing daerah sehingga ruang fiskal yang tercipta akan semakin tinggi. Selain itu, pemerintah juga harus mampu untuk menggali segala potensi daerah untuk menjadi sumber pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan ketersediaan ruang fiskal.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 75018,344 | 46339,054 | | 1,619 | ,111 |
| 1 Dana | 185,626 | 55,153 | ,362 | 3,366 | ,001 |
| Perimbangan | | | | | |
| Ruang Fiskal | 102,842 | 25,585 | ,713 | 4,020 | ,000 |
| Alokasi Belanja | | | | | |
| Modal | -108,082 | 74,303 | -,267 | -1,455 | ,151 |

Sumber: Data Diolah, 2019

3) Pengaruh Langsung Dana Perimbangan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut mengartikan bahwa adanya kenaikan dana perimbangan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh dana perimbangan terhadap penyerapan tenaga kerja mengindikasikan bahwa salah satu faktor penentu yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah.

Selain penggunaannya sebagai pemenuhan pembelanjaan operasional, dana perimbangan juga dimanfaatkan untuk pembangunan daerah seperti pembangunan SDM hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan fasilitas pendidikan seperti perbaikan ruang kelas dan juga program pelatihan bagi masyarakat. Dengan adanya dana perimbangan tentunya daerah akan mampu meningkatkan pelayanan publik dan juga menciptakan program padat karya yang melibatkan masyarakat untuk bekerja sehingga banyak tenaga kerja yang akan terserap.

Kapasitas keuangan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah menentukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat tercipta salah satunya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik yaitu secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja (Gousario & Dharmastuti, 2015). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Batara dkk., (2018) yang menyatakan bahwa

dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

4) Pengaruh Langsung Ruang Fiskal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut mengartikan bahwa kenaikan pada jumlah ruang fiskal yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dimanfaatkan oleh daerah sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh ruang fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja mengindikasikan bahwa salah satu faktor penentu yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah besarnya ruang fiskal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut dikarenakan ruang fiskal yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam tujuh tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan sehingga dengan hal tersebut masing-masing daerah akan semakin leluasa untuk menentukan program-program ataupun kebijakan yang dapat berujung pada penyerapan tenaga kerja tanpa mengganggu kapabilitas fiskal lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Karanassou *et al.*, (2005), perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan semua potensi ekonomi yang paling penting seperti pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja.

Ketersediaan ruang fiskal yang besar tentunya harus terus ditingkankan oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan pembangunan daerah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

dimiliki daerah, sebagai motor penggerak perekonomian kualitas SDM haruslah ditingkatkan. Peningkatan kualitas SDM tidak lepas dari fasilitas penunjang seperti fasilitas pendidikan yakni ruang kelas, tenaga pengajar, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, balai pelatihan juga harus diperhatikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Sehingga, dengan kualitas SDM yang baik segala kekayaan alam yang ada di masing-masing daerah dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan hal tersebut juga akan semakin meningkatkan ruang fiskal masing-masing daerah yang pada ujungnya akan kembali kepada masyarakat dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang terserap sehingga perekonomian masyarakat dan daerah akan semakin meningkat.

5) Pengaruh Langsung Alokasi Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

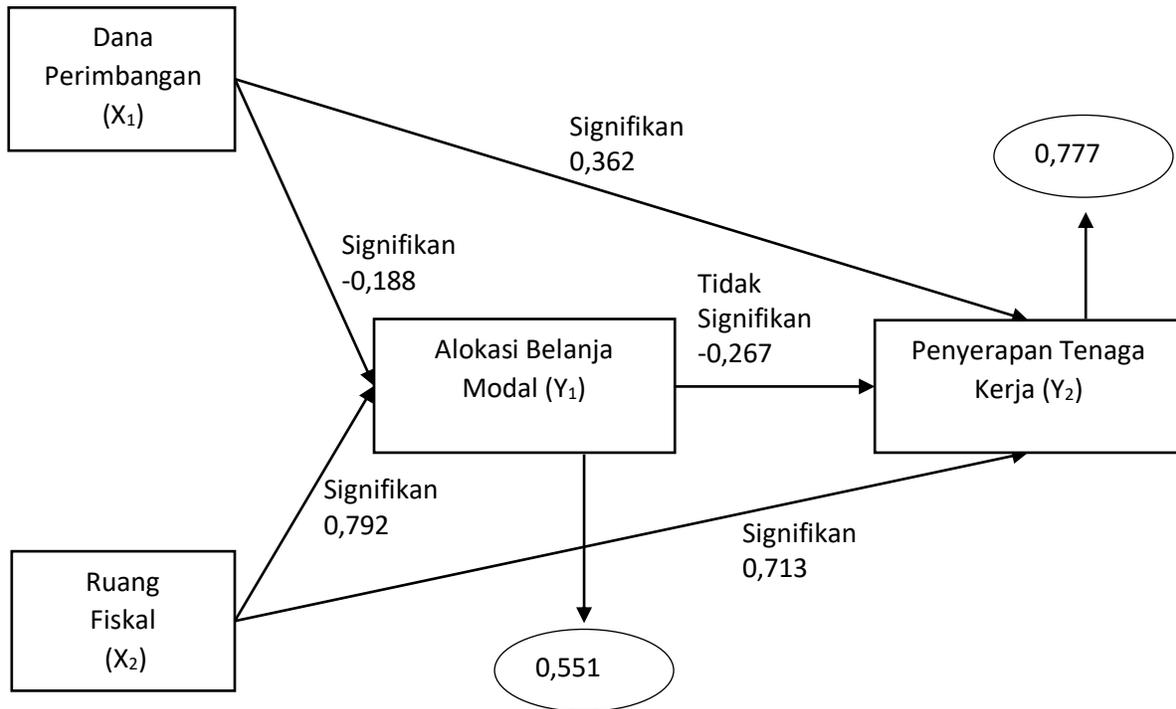
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa alokasi belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut mengartikan bahwa kenaikan pada pengalokasian belanja modal belum dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hukom (2015) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimana ketika IPM meningkat yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas SDM maka akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.

Hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh alokasi belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja terjadi dikarenakan tidak semua belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Belanja modal yang telah dilakukan pemerintah daerah seperti pembuatan jalan

nyatanya hanya dapat memperbaiki akses jalan bagi masyarakat, hal tersebut belum mampu menumbuhkan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, pembuatan gedung-gedung sebagian besar justru sepenuhnya dinikmati oleh pegawai pemerintah yang tidak berhubungan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan pengalokasian belanja modal pemerintah cenderung rendah, bahkan dalam kurun dua tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, serta penyerapan tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota pun cenderung mengalami ketimpangan. Selain itu, sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerinah daerah digunakan untuk membiayai komponen belanja langsung seperti belanja pegawai yang cenderung tinggi dan juga belanja barang, sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja belum dapat dirasakan.

Fasoranti *et al.*, (2012) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah harus mampu mengelola belanja operasional pemerintahannya. Perkembangan pengalokasian anggaran untuk belanja pegawai kabupaten/kota di Provinsi Bali masih dipandang jauh dari tujuan desentralisasi fiskal, bahwa adanya desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga ketika pengalokasian dana perimbangan untuk menciptakan kesejahteraan publik rendah maka hal tersebut tidak akan menciptakan kesejahteraan publik.



Gambar 2 Koefisien Jalur Hubungan Antarvariabel Penelitian

Pengaruh Tidak Langsung

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, maka dapat dihitung pengaruh tidak langsung dana perimbangan dan ruang fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui alokasi belanja modal selama tahun 2012-2018 (7 tahun) dengan metode uji sobel.

Tabel 4 Ringkasan Hasil Regresi Pengaruh Tidak Langsung Variabel

| Hubungan Variabel | Variabel Medasi | Z | Keterangan |
|---------------------------------|-----------------|------|--|
| X ₁ → Y ₂ | Y ₁ | 1,27 | Y ₁ bukan merupakan variabel intervening X ₁ terhadap Y ₂ |
| X ₂ → Y ₂ | Y ₁ | 1,44 | Y ₁ bukan merupakan variabel intervening X ₂ terhadap Y ₂ |

Sumber: Data Diolah, 2019

1) Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa alokasi belanja modal bukan merupakan variabel interveing dana perimbangan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut mengartikan bahwa pemanfaatan dana perimbangan sebagai belanja modal belum efektif sehingga belum adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemanfaatan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali salah satunya untuk dialokasikan dalam belanja modal daerah, karena belanja modal daerah yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan juga membuka akses bagi para investor untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sondakh (2017) dimana alokasi belanja modal belum mampu untuk meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja, hal itu disebabkan karena anggaran pemerintah daerah hanya sebagian kecil dianggarkan untuk belanja modal sedangkan pengalokasian untuk komponen belanja langsung seperti belanja pegawai dan juga belanja barang sangat besar sehingga dana yang dianggarkan pemerintah hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk belanja modal.

2) Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa alokasi belanja modal bukan merupakan variabel interveing ruang fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut mengartikan bahwa pemanfaatan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja modal namun belum memiliki dampak pada penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengalokasian ruang fiskal masing-masing daerah kedalam belanja modal nyatanya belum dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja masing-masing daerah di Provinsi Bali. Tidak semua daerah di Provinsi Bali melakukan pembelanjaan modal yang dapat memacu peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja seperti pembuata jalan, perbaikan irigasi bagi petani, dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hariyadi (2014) dimana pelayanan kepada publik tidak selalu dapat dikaitkan dengan belanja modal, pembelanjaan modal yang dilakukan sebagian besar hanya berupa aset tetap yang hanya dirasakan oleh pegawai pemerintah seperti perbaikan gedung dan juga pembelanjaan barang bagi keperluan operasional pemerintahan, sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya bagi penyerapan tenaga kerja di masing-masing kabupten/kota di Provinsi Bali.

Belanja modal diartikan sebagai suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Belanja modal merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan berguna dalam menggggerakkan roda perekonomian daerah. Sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk belanja modal dapat bersumber dari segala jenis penerimaan daerah seperti dana perimbangan yang berasal dari transfer pusat ke daerah dan juga ketersediaan ruang fiskal masing-masing daerah. Dana perimbangan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik sehingga pengalokasiannya untuk belanja modal sangat rendah. Sebagian besar dana perimbangan digunakan untuk pendanaan belanja pegawai dan belanja barang. Hal tersebut perlu diperhatikan agar transfer pusat ke daerah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak hanya digunakan untuk menunjang belanja pegawai melainkan juga belanja modal dimasing-masing daerah di Provinsi Bali.

Alokasi belanja modal seharusnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal diharapkan dapat mendatangkan investor

untuk menanamkan modalnya di masing-masing daerah di Provinsi Bali. Namun, hal tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya karena belanja modal yang dilakukan lebih mengarah kepada keperluan operasional pemerintahan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan ketersediaan ruang fiskal yang dimiliki dengan terus menggali potensi masing-masing daerah sebagai sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan ruang fiskal daerah yang dapat meningkatkan alokasi terhadap belanja modal. Dengan adanya alokasi belanja modal yang semakin banyak maka suatu daerah akan menjadi berkembang yang dapat ditunjukkan dengan aktivitas ekonomi masyarakat meningkat dan selain itu investasi asing maupun swasta akan masuk ke daerah, sehingga akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap yang juga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Kusuma, 2016).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu, 1) dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2) dana perimbangan dan ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan alokasi belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan 3) dana perimbangan dan ruang fiskal tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui alokasi belanja modal.

Saran

Berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali, pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai masalah ketimpangan penyerapan tenaga kerja yaitu antara pertumbuhan penduduk dan perkembangan

lapangan kerja yang tersedia di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jika permasalahan tersebut tidak ditangani dengan serius maka akan tercipta banyak pengangguran dan kemiskinan yang pada ujungnya akan merugikan daerah itu sendiri. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan anggaran yang dimiliki untuk dialokasikan kedalam belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks besarnya dana perimbangan dan juga ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, maka disarankan untuk mengalokasikan belanja daerah secara tepat antara belanja modal dan belanja operasional. Selain itu, pemerintah harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan daerah sehingga anggaran yang dimiliki pemerintah dapat dialokasikan dengan baik untuk dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja sehingga banyak penduduk yang akan terserap dalam pasar kerja. Berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah, disarankan kepada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk lebih menggali dan memanfaatkan potensi daerahnya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga nantinya setiap daerah memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, dan juga pemerintah dapat memanfaatkan dana bantuan pemerintah pusat sebagai dana tambahan untuk pembiayaan operasional daerah.

REFERENSI

- Anggaraini, N. K. W., & Utama, I. M. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kinerja Ekonomi di Wilayah Bali Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(6), 1228–1255.
- Batara, V. A., Jiuhardi, J., & Ulfah, Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Serta Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) Terhadap Belanja

- Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 3(3), 1–20.
- Bendesa, I. K. G and Sukarsa, I Made. (2012). *An Economic Survey of Bali. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 16(2), 31-53.
- Butkiewicz, J., & Yanikkaya, H. (2011). Institutions and The Impact of Government Spending on Growth. *Journal of Applied Economics*, 14(2), 319–341.
- Dalamagas, Basil. 2010. Publik Sektor and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 32. Hal:277-288.
- Dayuh Rimbawan, Nyoman. (2010). Pertumbuhan Ekonomi dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja di Provinsi Bali, *Jurnal PIRAMIDA*, 6(2), 1-12.
- Fasoranti, M. M. (2012). The Effect of Government Expenditure on Infrastructure on the Growth of the Nigeria Economy 1997-2009. *International Journal of Economic and Finansial*, 3(4), 513–518.
- Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study In 20 Counties/Cities of Level I Region. *The Winners*, 16(2), 152-165. <https://doi.org/10.21512/tw.v16i2.1568>
- Herman, E. (2011). The Impact of Economic Growth Process on Employment in European Union Countries. Year XIV No. 42. *The Romanian Economic Journal*, 14(2), 47-67.
- Hukom, A. (2015). Effect Of Capital Expenditures, Economic Growth And Poverty On Human Development In Central Kalimantan. *IOSR Journal of Economics and Finance Ver. IV*, 6(6), 2321–5933. <https://doi.org/10.9790/5933-06641927>
- Husna, N. Al, & Yudhistira, M. H. (2017). Studi Empirik Interaksi Strategis Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 113–124.
- Irvan, I. P., & Karmini, N. L. (2016). Pengeruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universits Udayana*, 5(3), 338–362.
- Karanassou, M., Sala, H., & Snower, D. J. (2005). Reappraisal of The Inflation-Unemployment Trade Off. *European Journal of Political Economy*, 21(1), 1–32.
- Kong, Tao. Arif Ramayanti. (2008). Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 7-32.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal*

Ekonomi Kuantitatif Terapan, 9(2), 1–88.

Lindblad, J. T. (2015). Foreign Direct Investment in Indonesia: Fifty Years of Discourse. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 217–273.

Mahi, B. R., & Nazara, S. (2015). Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(1), 7–31.

Martini, K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 426-443.

Ningsih, C. &, & Indrajaya, I. G. B. (2015). Pengaruh Modal dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajina Perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 83–91.

Nurudeen, A., and Usman, A. 2010. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregate Analysis. *Business and Economic Journal*. 4. Hal: 1-11.

Nworji Ifeanyi Desmond, Okwu, Andy Titus, Obiwuru Timothy C. & Nworji, Lucy Odiche. (2012). Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Negeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 1(7), 1-15

Ogujiuba, K., & Abraham, T. W. (2012). Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics Finance*, 4(11), 172–182.

Silver, C., Azis, I. J., & Schroeder, L. (2015). Intergovernmental Transfer and Decentralisation in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(3), 345–362.

Sondakh, G. Y. (2017). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado (Tahun 2006-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1), 146–156.

Sukirno, Sadono. (2000). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taufik, M. (2015). Pengaruh Investasi dan Ekpor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 90–101.

Wahab, A. L., & Abdulkadir, R. I. (2011). An analysis of Government Spending and Educational Sector and Its Contribution to GDP In Negeria. *International Journal of*

Financial Economics and Econometrics, 1(4), 64–71.

Wiwekananda, I. B. P., & Suyana Utama, I. M. (2016). Transformasi Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Buleleng Periode 2008-2013. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 37–45.